



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI
PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum terkait dengan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta maka diperlukan perubahan terhadap rencana aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 899);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 899) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf D.1 angka 8; huruf D.2 angka 5; huruf D.3 angka 28, dan angka 31; dan huruf E.2 angka 9, angka 10, dan angka 11 dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
2. Ketentuan huruf B angka 1; huruf D.1 angka 7, angka 9, dan angka 11; huruf D.2 angka 4; huruf D.3 angka 6, angka 12, angka 19, angka 26, angka 27, dan angka 40; huruf E.1 angka 22, dan angka 23; dan huruf E.3 angka 19, angka 27, dan angka 41 diubah sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, IGT yang sudah dilakukan kompilasi dan integrasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator ini tetap disimpan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 899).
2. Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2024

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 152

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
A. PENETAPAN MEKANISME DAN TATA KERJA PELAKSANAAN PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA						
1.	Penetapan Walidata IGT	Penetapan Walidata IGT pada Kementerian/ Lembaga	Keputusan Penetapan Walidata IGT	Bulan Agustus (B08) 2021	Badan Informasi Geospasial	Kementerian dan Lembaga terkait
2.	Penetapan Kelompok Kerja Nasional (POKJA) IGT	Penetapan POKJA IGT	Keputusan Penetapan POKJA IGT	Bulan Agustus (B08) 2021	Badan Informasi Geospasial	Kementerian dan Lembaga terkait
3.	Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta	Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta	Peraturan mengenai Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim PKSP	Bulan Agustus (B08) 2021	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Sekretariat Kabinet; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kantor Staf Presiden; 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan 5. Badan Informasi Geospasial
4.	Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Pembuatan IGT	Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja pembuatan IGT	Mekanisme dan Tata Kerja pembuatan IGT	Bulan Agustus (B08) 2021	Walidata IGT	Badan Informasi Geospasial
5.	Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Bulan Agustus (B08) 2021	Badan Informasi Geospasial	Kementerian dan Lembaga terkait
6.	Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Peta Batas Kecamatan dan Kelurahan	Menyusun Mekanisme dan Tata Kerja Peta Batas Kecamatan dan Kelurahan	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Bulan Agustus (B08) 2021	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian dan Lembaga terkait

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
7.	Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta	Menyusun Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta	Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Mekanisme Tata Kerja dan Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta	Bulan Agustus (B08) 2021	Badan Informasi Geospasial	Kementerian dan Lembaga terkait
B. PERWUJUDAN IGD						
1.	Perwujudan Peta Dasar	Mewujudkan tersedianya Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)	Peta RBI Skala 1:5.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2024	Badan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 4. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
			Peta RBI skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Mei (B05) 2021 dengan dukungan Peta Laut Indonesia	Badan Informasi Geospasial	
			Peta RBI skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Oktober (B10) 2022 dengan dukungan Peta Laut Indonesia	Badan Informasi Geospasial	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Penyediaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Wilayah Indonesia (CSRST)	Tersedianya Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Resolusi minimal 1,5 m	Seluruh wilayah Indonesia yang belum tersedia CSRST Bulan Juni (B06) 2024 Pemutakhiran CSRST di setiap wilayah prioritas	Badan Riset dan Inovasi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Pemerintah Provinsi; dan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
		Penyediaan Data Geospasial Dasar	Tersedianya Data Geospasial Dasar untuk Mendukung Penyediaan Peta RBI skala 1:5.000	Seluruh wilayah Indonesia (B12) 2024-2029	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Informasi Geospasial; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Pertahanan; dan 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
C. PEMUTAKHIRAN IGD						
1.	Pemutakhiran Peta Dasar	Memutakhirkan Peta RBI	Peta RBI skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan September (B09) 2024	Badan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
D. PERWUJUDAN IGT						
D.1 Perwujudan IGT Status						
1.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Kementerian Perhubungan;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						10. Badan Informasi Geospasial; 11. Pemerintah Provinsi; dan 12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
2.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Pertanahan	Peta Zona Nilai Tanah minimal skala 1: 10.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Kementerian Perhubungan; 10. Badan Informasi Geospasial; 11. Pemerintah Provinsi; dan 12. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
3.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Pertanahan	Peta Penguasaan dan Kepemilikan Tanah (Hak Milik) skala 1:5.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 8. Badan Informasi Geospasial; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
4.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Pertanahan	Peta Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Milik BUMN minimal skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; 	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Perindustrian;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Kementerian Perhubungan; 10. Badan Informasi Geospasial; 11. Pemerintah Provinsi; dan 12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
5.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Batas Wilayah	Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi skala 1:250.000 - 1: 25.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Bulan September (B09) 2021 tersedia peta kerja indikatif Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi;	Kementerian Dalam Negeri	1. Sekretariat Kabinet; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Kementerian Luar Negeri; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran setiap Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12).		7. Badan Informasi Geospasial; 8. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 9. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; 10. Direktorat Topografi, Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat; dan 11. Pemerintah Provinsi.
6.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Migas dan Minerba	Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Penugasan Panas Bumi Indonesia skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Badan Informasi Geospasial;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08) 2021, Bulan September (B09) dan Desember (B12) setiap tahun.		8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
7.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Luar Negeri; 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Kementerian Pertahanan; 8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 9. Kementerian Perhubungan;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						10. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 11. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 13. Sekretariat Kabinet; 14. Badan Informasi Geospasial; dan 15. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
8.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Wilayah Adat	Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat di Perairan Laut skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						6. Kementerian Pertahanan; 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 8. Kementerian Perhubungan; 9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 10. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 12. Sekretariat Kabinet; 13. Badan Informasi Geospasial; dan 14. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
9.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kawasan Khusus	Peta Kawasan Berikat dan Kawasan Lainnya Di Bawah Pengawasan Pabean skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Perdagangan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
10.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Pertanahan	Peta Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah minimal skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 10. Kementerian Perhubungan; 11. Badan Informasi Geospasial; 12. Pemerintah Provinsi; dan 13. Pemerintah Kabupaten/Kota.
11.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) skala 1:50.000/ Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Pertanian; 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						9. Kementerian Pertahanan; 10. Badan Informasi Geospasial; dan 11. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
12.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru skala 1:250.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12).	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Pertanian; 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 9. Badan Informasi Geospasial.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
13.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021 Integrasi. 2. Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12). 	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Pertanian; 7. Badan Informasi Geospasial; dan 8. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
14.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Tata Batas Area Kerja Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT/RE) skala 1:50.000/ Peta Penetapan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			Hutan (Perizinan Berusaha) skala 1:50.000	2. Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.		5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Badan Informasi Geospasial; dan 9. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
15.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan skala 1:50.000/ Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						8. Badan Informasi Geospasial; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
16.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Hak Pengelolaan Hutan Desa skala 1:50.000/ Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 8. Badan Informasi Geospasial; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
17.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun. 	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 8. Badan Informasi Geospasial; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
18.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; 	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Pertanian;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemetakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.		5. Badan Informasi Geospasial; dan 6. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
19.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemetakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Pertanian; 6. Badan Informasi Geospasial; dan 7. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
20.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan	Peta Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
21.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kawasan Khusus	Peta Sebaran Kegiatan Industri skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 	Kementerian Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Perdagangan; 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		6. Pemerintah Provinsi; dan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
22.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kawasan Khusus	Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Perhubungan	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
23.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kawasan Khusus	Peta Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) skala 1:5.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan 3. Kementerian Dalam Negeri;
24.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kawasan Khusus	Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Perdagangan; 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 8. Badan Informasi Geospasial;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						9. Badan Koordinasi Penanaman Modal; 10. Pemerintah Provinsi; dan 11. Pemerintah Kabupaten/Kota.
25.	Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Proyek Strategis	Peta Proyek Strategis Nasional (PSN) skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Perhubungan; 6. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 7. Kementerian Perindustrian; 8. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 13. Pemerintah Provinsi; dan 14. Pemerintah Kabupaten/Kota.
D.2 Perwujudan IGT Perencanaan Ruang						
1.	Perwujudan IGT Perencanaan Ruang	Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Recana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan skala 1:500.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Pemerintah Provinsi; dan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
2.	Perwujudan IGT Perencanaan Ruang	Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) skala 1:5.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru. 	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Badan Informasi Geospasial; 5. Pemerintah Provinsi; dan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota.
3.	Perwujudan IGT Perencanaan Ruang	Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah skala 1:500.000 - 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Luar Negeri;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.		6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 8. Kementerian Perhubungan; 9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 10. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 12. Sekretariat Kabinet; 13. Badan Informasi Geospasial; dan 14. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
4.	Perwujudan IGT Perencanaan Ruang	Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru. 	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Luar Negeri; 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Kementerian Pertahanan; 8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 9. Kementerian Perhubungan; 10. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 11. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						13. Sekretariat Kabinet; 14. Badan Informasi Geospasial; dan 15. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
D.3 Perwujudan IGT Potensi						
1.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Neraca Penatagunaan Tanah skala 1: 50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Pemerintah Provinsi; dan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
2.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Sawah yang Dilindungi minimal skala 1:5.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Pertanian 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 8. Kementerian Perindustrian; 9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 10. Badan Informasi Geospasial; 11. Pemerintah Provinsi; dan 12. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
3.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Kawasan Gudang BUMN skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Perdagangan; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Perindustrian; dan 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Cekungan Air Tanah minimal skala 1:250.000	IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Badan Informasi Geospasial; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
5.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Kerentanan Likuifaksi skala 1:100.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 3. Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun:	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				a. 2021: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten; b. 2022: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat; c. 2023: Bengkulu, Jambi, dan Lampung; d. 2024: Sulawesi Tengah dan Gorontalo.		
6.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Patahan Aktif Indonesia skala 1:1.000.000 dan 1:100.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Badan Informasi Geospasial; 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 3. Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun: a. 2021: Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera; b. 2022: Kalimantan; c. 2023: Sulawesi; d. 2024: Papua.		6. Pemerintah Provinsi; dan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
7.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Terminal Bahan Bakar Minyak dan Terminal LPG skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 6. Kementerian Perindustrian;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Kementerian Perdagangan; dan 8. Kementerian Perhubungan.
8.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Lokasi Kilang Minyak skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Kementerian Perdagangan; dan 8. Kementerian Perhubungan.
9.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Kerentanan Pesisir skala 1:250.000 - 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		4. Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan 7. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
10.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Pembudidayaan Ikan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3. Badan Informasi Geospasial; dan 4. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
11.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perhubungan; 3. Badan Informasi Geospasial; 4. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan 5. Pemerintah Provinsi.
12.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 4. Badan Informasi Geospasial; dan 5. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
13.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Garam skala 1:25.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perindustrian; 4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Pusat Statistik; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
14.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Fasilitas Sosial Fasilitas Umum (Fasos Fasum) dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Akses Layanan Keuangan skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 5. Bank Indonesia; 6. Badan Pusat Statistik; 7. Otoritas Jasa Keuangan; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
15.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Rawan Erosi skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan September (B09) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan 7. Badan Informasi Geospasial.
16.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Kritis skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan September (B09) 2022; 	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2022. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan 7. Badan Informasi Geospasial.
17.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Desember (B12) 2021; b. Integrasi Bulan Maret (B03) 2022. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Pertanian;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 10. Badan Informasi Geospasial; 11. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 12. Pemerintah Provinsi; dan 13. Pemerintah Kabupaten/Kota.
18.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Mangrove Nasional skala 1:50.000 - 1:25.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 7. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 8. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; 9. Pemerintah Provinsi; dan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
19.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) minimal skala 1:250.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan September (B09) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Kementerian Pertanian; 8. Badan Informasi Geospasial; 9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 10. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 11. Pemerintah Provinsi; dan 12. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
20.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Perhubungan; 9. Badan Informasi Geospasial; 10. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 11. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 12. Badan Riset dan Inovasi Nasional.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
21.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Daerah Irigasi Rawa skala 1:5.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun; 3. Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun: <ol style="list-style-type: none"> a. 2021 : Kalimantan dan Sumatera; b. 2022 : Papua. 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Pertanian; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
22.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Daerah Irigasi Tambak skala 1:5.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Pertanian;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun; 3. Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun: a. 2021: Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan; b. 2022: Sumatera.		4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Badan Informasi Geospasial; 8. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
23.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Neraca Sumber Daya Air skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Kementerian Pertanian 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						8. Badan Informasi Geospasial; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
24.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lokasi Danau, Situ dan Embung skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 8. Badan Informasi Geospasial; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
25.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Kawasan Permukiman Kumuh skala 1:5.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 7. Kementerian Kesehatan;
26.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Gudang dan Pusat Distribusi skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Perindustrian; 4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 6. Badan Informasi Geospasial;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
27.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Faso Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Pasar Rakyat skala 1:50.000 – 1:5.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 8. Badan Informasi Geospasial; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
28.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Alur Pelayaran Laut skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Badan Informasi Geospasial; dan 5. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
29.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran skala 1:50.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. 	Kementerian Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Badan Informasi Geospasial; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan 5. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
30.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Ruang Udara skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Perhubungan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 4. Kementerian Pertahanan; dan 5. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
31.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Cetak Sawah Indonesia skala 1:5.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
32.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Perdagangan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Badan Informasi Geospasial; 8. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
33.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Pertanian Hortikultura skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; 	Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
34.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Perkebunan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
35.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Peternakan skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemitakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
36.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Rawan Banjir skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. 2. Pemitakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						9. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 10. Pemerintah Provinsi; dan 11. Pemerintah Kabupaten/Kota.
37.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Seismisitas Gempa Bumi skala 1:50.000 - 1:25.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Badan Informasi Geospasial; dan 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
38.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Terumbu Karang skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3. Pemerintah Provinsi; dan 4. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
				2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.		
39.	Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Objek Vital Nasional skala 1:50.000	1. IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; b. Integrasi Bulan September (B09) 2021. 2. Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Sekretariat Negara; 5. Sekretariat Kabinet; 6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 8. Kementerian Perindustrian; 9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 10. Kementerian Perhubungan; 11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						12. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 13. Badan Intelijen Negara; dan 14. Badan Informasi Geospasial.
E. PEMUTAKHIRAN IGT						
E.1 Pemuktahiran IGT Status						
1.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Pertanahan	Peta Hak Guna Usaha (HGU), minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Pertanian; 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Badan Informasi Geospasial;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
2.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Pertanahan	Peta Hak Pengelolaan (HPL), minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Pertanian; 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Badan Informasi Geospasial; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
3.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Pertanahan	Peta Hak Guna Bangunan (HGB) minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Perindustrian, 3. Kementerian Pertanian; 4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 9. Badan Informasi Geospasial; 10. Pemerintah Provinsi; dan 11. Pemerintah Kabupaten/Kota.
4.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Pertanahan	Peta Hak Ulayat, minimal skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Badan Informasi Geospasial; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
5.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Peta Izin Lokasi dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Perindustrian; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Kementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Badan Informasi Geospasial; 10. Pemerintah Provinsi; dan 11. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
6.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Batas Wilayah	Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000	Seluruh Wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun	Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2. Kementerian Luar Negeri; 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 4. Badan Informasi Geospasial; 5. Direktorat Topografi, Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat; 6. Pemerintah Provinsi; dan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
7.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Batas Wilayah	Peta Batas Administrasi Desa/Desa Adat dan Peta Batas Administrasi Kelurahan minimal skala 1:10.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun: Desa: 2021: 10 Provinsi; 2022: 12 Provinsi; 2023: 11 Provinsi. Kelurahan: 2021: 5 Provinsi; 2022: 13 Provinsi; 2023: 15 Provinsi.	Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Badan Informasi Geospasial; 4. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Direktorat Topografi, Tentara Nasional Indonesia- Angkatan Darat; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
8.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Kementerian Perhubungan; 8. Badan Informasi Geospasial; 9. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 10. Pemerintah Provinsi; dan 11. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
9.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Perhubungan; 7. Badan Informasi Geospasial; 8. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
10.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba	Peta Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08), Bulan September (B09) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Perhubungan; 9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. Badan Informasi Geospasial; 11. Komisi Pemberantasan Korupsi; 12. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; 13. Pemerintah Provinsi; dan 14. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
11.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhiran IGT Migas dan Minerba	Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08), Bulan September (B09) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Badan Informasi Geospasial; 10. Pemerintah Provinsi; dan 11. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
12.	Pemukakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemukakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap ada perubahan/penetapan baru	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Kementerian Perindustrian; 4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Badan Koordinasi Penanaman Modal; 8. Badan Informasi Geospasial; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
13.	Pemukakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemukakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap ada perubahan/penetapan baru	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Perdagangan; 4. Kementerian Perhubungan;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal; 7. Badan Informasi Geospasial; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
14.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang	Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI) skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Perindustrian; 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						9. Badan Informasi Geospasial; 10. Pemerintah Provinsi; dan 11. Pemerintah Kabupaten/Kota.
15.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Batas Wilayah	Peta Batas Darat Negara skala 1: 25.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada kesepakatan/penetapan baru	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Pertahanan; 7. Direktorat Topografi, Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat; 8. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
16.	Pemukakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Batas Wilayah	Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemukakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada kesepakatan/ penetapan baru	Kementerian Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pertahanan; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 4. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan 5. Badan Informasi Geospasial.
17.	Pemukakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Penetapan Kawasan Hutan pada skala 1:100.000 - 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemukakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08), Bulan September (B09) dan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Pemerintah Provinsi; dan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
18.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE), minimal pada skala 1:50.000/ Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Badan Informasi Geospasial; dan 4. Pemerintah Provinsi.
19.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala 1:50.000/Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Kementerian Pertanian; 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Pemerintah Provinsi; dan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
20.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Badan Informasi Geospasial; 4. Pemerintah Provinsi; dan 5. Pemerintah Kabupaten/Kota.
21.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Hutan Adat, Minimal pada skala 1:50.000/ Peta Penetapan Hutan Adat minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Kementerian Pertanian; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Badan Informasi Geospasial; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
22.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Kawasan Hutan skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Desember (B12) setiap tahun atau setiap ada penetapan baru.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Badan Informasi Geospasial; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
23.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan minimal skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/penetapan baru.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Kabinet; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Badan Informasi Geospasial; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
24.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Rencana Kawasan Industri skala 1: 50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Perindustrian	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Pemerintah Provinsi; dan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota
25.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1: 50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3. Kementerian Pertahanan; 4. Kementerian Perindustrian;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 9. Kementerian Pertanian; 10. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Pemerintah Provinsi; dan 12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
26.	Pemutakhiran IGT Status	Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus	Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya skala 1: 50.000	Seluruh wilayah Indonesia Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3. Kementerian Pertahanan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 9. Kementerian Pertanian; 10. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Pemerintah Provinsi; dan 12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
E.2 Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang						
1.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta RTRW Nasional (RTRWN) skala 1:1.000.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran setiap ada perubahan/penetapan baru.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Kementerian Perhubungan; 8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 9. Kementerian Pertanian; 10. Badan Informasi Geospasial; 11. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 12. Pemerintah Provinsi.
2.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta RTRW Provinsi skala 1:250.000	Seluruh Wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Perhubungan; 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 8. Kementerian Pertanian; 9. Badan Informasi Geospasial; 10. Badan Riset dan Inovasi Nasional;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						11. Pemerintah Provinsi; dan 12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
3.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan RTRW Kota skala 1:25.000	Seluruh Wilayah Indonesia Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Perhubungan; 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 8. Kementerian Pertanian; 9. Badan Informasi Geospasial; 10. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 11. Pemerintah Provinsi; dan 12. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
4.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta RTR KSN 1:250.000 - 1:5.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Kementerian Perhubungan; 8. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 9. Kementerian Pertanian; 10. Badan Informasi Geospasial; 11. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 12. Pemerintah Provinsi; dan 13. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
5.	Pemukhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemukhiran Bulan Desember (B12) setiap 5 tahun (setiap ada perubahan/ penetapan baru).	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Perhubungan; 6. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 9. Kementerian Perindustrian; 10. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Kementerian Kesehatan; 12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 13. Badan Informasi Geospasial;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						14. Pemerintah Provinsi; dan 15. Pemerintah Kabupaten/Kota.
6.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta RKP skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Perhubungan; 6. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 9. Kementerian Perindustrian; 10. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Kementerian Kesehatan;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 13. Badan Informasi Geospasial; 14. Pemerintah Provinsi; dan 15. Pemerintah Kabupaten/Kota.
7.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Kawasan Wilayah Pertahanan Negara skala 1:1.000.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran setiap ada perubahan/ penetapan baru.	Kementerian Pertahanan	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
8.	Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang	Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang	Peta Rinci Wilayah Pertahanan Negara skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pertahanan	1. Kementerian Koordinator Pertahanan dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 8. Badan Informasi Geospasial; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
E.3 Pemetakhiran IGT Potensi						
1.	Pemetakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Penggunaan Tanah minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemetakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Badan Informasi Geospasial;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 8. Pemerintah Provinsi;
2.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Baku Sawah Nasional skala minimal 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Kementerian Pertanian; 5. Badan Informasi Geospasial; dan 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
3.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Infrastruktur Pipa Gas Bumi skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Perindustrian; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 8. Kementerian Perhubungan; dan 9. Pemerintah Provinsi.
4.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Jaringan Listrik skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 10. Kementerian Perindustrian;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						11. Badan Informasi Geospasial; 12. Pemerintah Provinsi; dan 13. Pemerintah Kabupaten/Kota.
5.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Gardu Listrik skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 10. Kementerian Perindustrian;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						11. Badan Informasi Geospasial; 12. Pemerintah Provinsi; dan 13. Pemerintah Kabupaten/Kota.
6.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 10. Kementerian Perindustrian;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						11. Badan Informasi Geospasial; 12. Pemerintah Provinsi; dan 13. Pemerintah Kabupaten/Kota.
7.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 10. Kementerian Perindustrian;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						11. Badan Informasi Geospasial; 12. Pemerintah Provinsi; dan 13. Pemerintah Kabupaten/Kota.
8.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Geologi skala 1:100.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan baru.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
9.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Hidrogeologi skala 1:100.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan baru.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi; 2. Kementerian Dalam Negeri;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
10.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Kebencanaan	Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Perhubungan;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						6. Badan Informasi Geospasial; 7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
11.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Kebencanaan	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Perhubungan; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
12.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Kebencanaan	Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1: 50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Kementerian Perhubungan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
13.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Kebencanaan	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami skala 1: 50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Perhubungan; 7. Badan Informasi Geospasial; 8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
14.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber daya Lingkungan	Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Pemerintah Provinsi; dan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
15.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba	Peta Sumber Daya Mineral Skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Kementerian Perindustrian; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Badan Tenaga Nuklir; 8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota.
16.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba	Peta Sumber Daya Batubara skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Badan Informasi Geospasial; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
17.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba	Peta Sumber Daya Panas Bumi skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) setiap tahun.	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Kementerian Perindustrian;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
18.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Jaringan Serat Optik skala 1: 50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perhubungan; 3. Badan Keamanan Laut; dan 4. Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
19.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Potensi Wilayah Penangkapan Ikan skala 1:250.000/Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 5. Badan Informasi Geospasial; dan 6. Pemerintah Provinsi.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
			Republik Indonesia (WPPNRI) skala 1:250.000			
20.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 5. Badan Informasi Geospasial; dan 6. Pemerintah Provinsi.
21.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada penetapan baru.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perhubungan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Pemerintah Provinsi; dan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
22.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada penetapan baru.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Pertanian; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
23.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Kehutanan	Peta Neraca Sumber Daya Hutan skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Badan Informasi Geospasial; 4. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 5. Pemerintah Provinsi.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
24.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Lingkungan	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000 (Klasifikasi DAS)	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Kementerian Pertanian; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
25.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Lingkungan	Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun: 2021: 30 Kawasan TWA 2022: 50 Kawasan TWA 2023: 50 Kawasan TWA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Pemerintah Provinsi; 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
26.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
27.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Rusun skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Badan Informasi Geospasial; 4. Pemerintah Provinsi; dan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Pemerintah Kabupaten/Kota.
28.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Jalan Nasional Tol dan Jalan Nasional Non Tol, dan Peta Jalan Provinsi Peta Jalan Kabupaten/Kota skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian/Lembaga terkait; 2. Pemerintah Provinsi; dan 3. Pemerintah Kabupaten/Kota.
29.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
30.	Pemukakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemukakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Pemerintah Provinsi; dan 5. Pemerintah Kabupaten/Kota.
31.	Pemukakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemukakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Pemerintah Provinsi; dan 5. Pemerintah Kabupaten/Kota.
32.	Pemukakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Lingkungan	Peta Air Tanah skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemukakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Pertanian; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Badan Pusat Statistik; 8. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 9. Pemerintah Provinsi; dan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota
33.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:5.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 6. Badan Informasi Geospasial;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						7. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
34.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Bendungan Eksisting dan Peta Sebaran Lokasi Bendungan Rencana skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun: 2021: 4 bendungan 2022: 6 bendungan 2023: 5 bendungan 2024: 5 bendungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian Pertanian; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 6. Pemerintah Provinsi; dan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
35.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas	Peta Sebaran Lokasi Sabo DAM skala 1: 50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada pembangunan baru.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 4. Pemerintah Provinsi; dan 5. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
36.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap 10 tahun.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Pertanian; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 7. Badan Informasi Geospasial; 8. Pemerintah Provinsi; dan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota.
37.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kementerian Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Perindustrian;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						6. Badan Informasi Geospasial; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
38.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kementerian Perhubungan	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
39.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kementerian Perhubungan	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kementerian Perindustrian; 6. Badan Informasi Geospasial; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.
40.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kementerian Perhubungan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
41.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik	Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun Kereta Api skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Kementerian Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 7. Pemerintah Provinsi; dan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
42.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Lahan Gambut skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Badan Informasi Geospasial; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 7. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
43.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Tanah Semi-Detail skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 3. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Badan Informasi Geospasial; dan 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
44.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia minimal skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Badan Informasi Geospasial;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 6. Pemerintah Provinsi; dan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
45.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Sistem Lahan (Morfologi) dan Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Badan Informasi Geospasial; dan 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
46.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Penutup Lahan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
47.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Potensi Desa (Sosial-Ekonomi), minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada sensus baru.	Badan Pusat Statistik	1. Kementerian/ Lembaga terkait; 2. Pemerintah Provinsi; dan 3. Pemerintah Kabupaten/Kota.
48.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Badan Informasi Geospasial; dan 5. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
49.	Pemutakhiran IGT Potensi	Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan	Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun.	Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Pertanian;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 5. Badan Informasi Geospasial; dan 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
F. Infrastruktur Informasi Geospasial						
1.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal	Sosialisasi Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI)	Bulan Agustus (B08) 2021	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 4. Badan Standardisasi Nasional; dan 5. Pemerintah Provinsi.
2.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Sosialisasi Spesifikasi Produk Data, Metadata dan Informasi Kualitas IG	Bulan Agustus (B08) 2021	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kantor Staf Presiden; 5. Sekretariat Kabinet;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						6. Pemerintah Provinsi; dan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota.
3.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal KSP	Tersediannya Katalog IG akses terbatas maupun publik dalam Geoportal PKSP (Penghubung Simpul Jaringan)	Bulan Agustus (B08) 2021	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Pemerintah Provinsi; dan 5. Pemerintah Kabupaten/Kota.
4.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Ketersediaan Katalog IGD untuk mendukung KSP dalam Geoportal Simpul Jaringan Badan Informasi Geospasial berbasis <i>Geospatial Open Linked Data</i> (GOLD)	Bulan Agustus (B08) 2021	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Sekretariat Kabinet; 5. Pemerintah Provinsi; dan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
5.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersediannya standar berbagi data melalui <i>Geospatial Open Linked Data</i> (GOLD)	Bulan Agustus (B08) 2021	Badan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Pemerintah Provinsi; dan 4. Pemerintah Kabupaten/Kota.
6.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersediannya Katalog berbagi data di Geoportal KSP (Penghubung Simpul Jaringan) melalui <i>Geospatial Open Linked Data</i> (GOLD)	Bulan Desember (B12) 2021	Badan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Pemerintah Provinsi; dan 4. Pemerintah Kabupaten/Kota.
7.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersediannya skema integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (<i>decision support system</i>)	Bulan Agustus (B08) 2021	Badan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Pemerintah Provinsi; dan 5. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
8.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Sosialisasi skema integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (<i>decision support system</i>)	Bulan Agustus (B08) 2021	Badan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Pemerintah Provinsi; dan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota.
9.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Penyiapan integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (<i>decision support system</i>)	Bulan September (B09) 2021	Badan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Pemerintah Provinsi; dan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
10.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersedianya fungsi geoportal KSP (Penghubung simpul Jaringan) sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan (<i>decision support system</i>)	Bulan Desember (B12) 2022	Badan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Pemerintah Provinsi; dan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota.
11.	Penyerbarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersedianya IGT melalui skema <i>Content Delivery Network (CDN)</i> dalam pusat data terdistribusi	Bulan Desember (B12) 2021	Badan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Pemerintah Provinsi; dan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
12.	Penyerbarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersedianya IGT melalui skema <i>Content Delivery Network (CDN)</i> dalam pusat data terdistribusi 1 lokasi	Bulan Desember (B12) 2021	Badan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Pemerintah Provinsi; dan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota.
13.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersedianya IGT KSP melalui replika <i>Content Delivery Network (CDN)</i> dalam pusat data terdistribusi 2 lokasi	Bulan Desember (B12) 2023	Badan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Pemerintah Provinsi; dan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
14.	Penyebarluasan Data IG	Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP	Tersedianya IGT KSP melalui replika <i>Content Delivery Network</i> (CDN) dalam pusat data terdistribusi 3 lokasi	Bulan Desember (B12) 2024	Badan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Pemerintah Provinsi; dan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota
15.	Penyusunan <i>Grand Design</i> Pembangunan Pusat Data Nasional	Penyusunan <i>Grand Design</i> Produk PKSP dalam Pusat Data Nasional	Dokumen Kajian <i>Grand Design</i> Produk PKSP dalam Pusat Data Nasional	Bulan Desember (B12) 2021	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 8. Kantor Staf Presiden; 9. Sekretariat Kabinet;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						10. Badan Informasi Geospasial; dan 11. Badan Sandi dan Siber Negara.
G. SINKRONISASI IGT						
1.	Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan	Identifikasi Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan	Penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI)	Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Pertanian; 8. Kementerian Perindustrian; 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Badan Informasi Geospasial;

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
						11. Pemerintah Provinsi; dan 12. Pemerintah Kabupaten/Kota.
		Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan	Rekomendasi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan	Seluruh wilayah Indonesia Bulan Desember (B12) setiap tahun Tahun 2021: 10 Provinsi Tahun 2022: 14 Provinsi Tahun 2023: 10 Provinsi	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Pertanian; 8. Kementerian Perindustrian; 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Badan Informasi Geospasial; 11. Pemerintah Provinsi; dan 12. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan	Rencana Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan	Seluruh wilayah Indonesia Bulan Desember (B12) setiap tahun Tahun 2021: 10 Provinsi Tahun 2022: 14 Provinsi Tahun 2023: 10 Provinsi	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Pertanian; 8. Kementerian Perindustrian; 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Badan Informasi Geospasial; 11. Pemerintah Provinsi; dan 12. Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
2.	Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Kepada Presiden RI	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta	Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP)	Bulan Agustus (B08) 2021; Bulan Desember (B12) 2021; Bulan Juni (B06) 2022; Bulan Desember (B12) 2022; Bulan Juni (B06) 2023; Bulan Desember (B12) 2023; Bulan Juni (B06) 2024; Bulan Desember (B12) 2024;	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kantor Staf Presiden; 4. Sekretariat Kabinet; dan 5. Badan Informasi Geospasial.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO